

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2013

FURI INDAH PERMATASARI

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu. Rumusan permasalahannya sebagai berikut : 1) Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan/analisis data adalah reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013 secara umum sudah dapat terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal. 2) Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bekerja di luar daerah, masyarakat belum memiliki pemahaman keunggulan calon Walikota, kurang dapat mendapatkan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan Walikota, kepengurusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak terdapat perubahan atau pergantian anggotanya, kurang adanya kerjasama khususnya antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat, mendata ulang masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di luar daerah, memberikan pemahaman penilaian atas berbagai keunggulan calon, memberikan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan walikota, upaya mendaftar untuk menjadi anggota penyelenggara pilkada, melakukan komunikasi dan pendekatan untuk menciptakan adanya kerjasama.

Kata Kunci : *Partisipasi, politik masyarakat, pemilihan walikota*

A. PENDAHULUAN

Pilkada yang merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pilkada).

Undang-undang No 8 tahun 2012 pasal 2 bahwa : “Pilkada dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Memilih dalam pemilihan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Bagaimana perilaku politik dalam memilih dalam pemilihan dapat dijelaskan dalam pendekatan perilaku memilih. Penjelasan tentang perilaku memilih dikenal dua model atau pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi Asfar (2006: 137-141). Pendekatan pertama dikenal sebagai mazhab Columbia (*the Columbia school of electoral behavior*) dan yang

kedua disebut dengan mazhab Michigan (*the Michigan survey research center*). Mazhab pertama menekan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sedangkan mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.

Faktor-faktor sosiologis, misalnya tentang karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb), latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur). Sedangkan faktor psikologis, mencakup tiga aspek yang merupakan kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Perilaku memilih juga dapat dijelaskan dengan pendekatan rasional Asfar (2006: 146) pendekatan ini diadaptasi dari ilmu ekonomi, yaitu analogi antar pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).

Peranan pemerintah dalam kehidupan politik masyarakat telah mendunia secara signifikan, peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan sehingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan menjamin keamanan kehidupan sosial, sebagaimana masyarakat menjadi sangat kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi.

Berdasarkan hasil peninjauan penulis, diketahui terdapat masalah yang paling mendasar dalam keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013, yaitu banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, hal ini diakibatkan oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Mereka yang bekerja memilih pergi ke tempat kerjanya, seperti di lingkungan Cikabuyutan banyak orang yang bekerja di luar kota tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.
2. Pemilih yang bekerja sebagai pedagang cenderung masih kurang peduli terhadap berjalannya pilkada (apatis), mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan uang dari calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut.
3. Masyarakat kurang yakin terhadap visi dan misi yang dijanjikan oleh para calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut, karena anggapan

masyarakat ketika sudah terpilih, visi dan misi yang dijanjikan tidak dilaksanakan dengan baik.

Dilihat dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013 ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013 ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013 ?

B. LANDASAN TEORITIS

Istilah partisipasi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, *pars* yang berarti “bagian”, dan *capere* yang berarti mengambil; sehingga partisipasi berarti mengambil bagian. Istilah partisipasi politik diterapkan pada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik. Suharno, (2004:102-103) menyatakan bahwa:

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya

bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *Participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Selanjutnya Syafiie, (2002 : 132) menyatakan bahwa :

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.

Dalam hal ini politik diartikan bagaimana kelompok-kelompok

mencapai keputusan-keputusan yang kolektif untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggota kelompok

Menurut Heywood (Budiardjo, 2008 : 16) menyatakan :

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Partisipasi politik secara umum yaitu keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Dalam keterlibatannya tersebut, seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Basrowi, Sudikin dan Susilo, (2012:65) bahwa: “Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab di antara mereka”.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum.

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di Kota Banjar. Pilkada merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Kota Banjar untuk lima tahun kedepan.

Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak

akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (pilkada), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah kota. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan kota. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pilkada sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang partisipasi politik yang meliputi pengertian partisipasi, partisipasi politik, partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik dan Pemilihan Walikota dan wakil walikota yang meliputi pengertian demokrasi, pilkada, tujuan pilkada, landasan dan asas pilkada, maka peneliti menyimpulkan apabila masyarakat memiliki kesadaran politik dan cenderung aktif dan apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi cenderung pasif atau apatis. Dengan demikian partisipasi politik masyarakat

dalam pemilihan kepala daerah akan optimal apabila sesuai dengan jenis-jenis partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan kepala daerah akan optimal apabila sesuai dengan jenis-jenis partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi (*contacting*) dan tindakan kekerasan (*violence*).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada dikancah penelitian. Sumber data yang ada diambil secara purposif, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Aparatur Kelurahan, Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) . Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tim sukses, Tim relawan, Masyarakat Kelurahan Hegarsari.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi berperan serta. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian.

Sementara itu, model yang digunakan adalah analisis data interaktif, yakni (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Menarik kesimpulan/Verifikasi.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum, berpartisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu mendasari pada kehendak hati nurani secara sukarela dalam kehidupan politik. Partisipasi politik amat penting dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki

adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pilkada sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tahun 2013 secara umum sudah dapat terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban informan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik sebanyak 18 indikator dan ada 1 indikator yang tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibahas sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemilihan

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tahun 2013, yaitu jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihannya sebanyak 996 orang, meskipun telah terdaftar dalam

pilkada dari jumlah 3125 DPT. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kurang dapat memberikan hak suaranya dalam PILKADA khususnya pemilihan Walikota. Dalam pemilihan Walikota yang ada di Kelurahan Hegarsari, masyarakat telah memiliki pemahaman dapat melakukan penilaian atas berbagai keunggulan calon walikota sehingga dalam pelaksanaan pilkada masyarakat secara bebas dan tidak ada paksaan dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya.

Selanjutnya di Kelurahan Hegarsari, pemilih tetap pada pemilihan Walikota Tahun 2013 dalam melakukan pemilihan secara langsung, artinya masyarakat secara langsung melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Dalam kegiatan kampanye, namun demikian ada sebagian kecil masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan dananya untuk keperluan kampanye calon, itu juga masyarakat yang memang menjadi kader partai calon, keluarga calon dan simpatisan.

2. *Lobbying*

Di Kelurahan Hegarsari dalam pelaksanaan pilkada 2013 antara masyarakat dengan para aparatur kelurahan terjalin hubungan yang baik, hal ini terlihat dari adanya sejumlah masyarakat yang sering melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai

pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan lancar. Terkait pelaksanaan komunikasi antara masyarakat dengan para tokoh politik di tingkat Kelurahan kurang dilakukan masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan jaranganya masyarakat melakukan pendekatan-pendekatan dengan para tokoh – tokoh melalui kunjungan ke rumah, pelaksanaan pertemuan – pertemuan dengan para tokoh politik.

3. Kegiatan Organisasi

Dalam setiap pelaksanaan pilkada di Kelurahan Hegarsari kepengurusan PPS maupun PPK tidak dapat terdapat perubahan atau pergantian anggotanya hal ini karena masyarakat enggan untuk mendaftar menjadi anggota yang baru dalam kepengurusannya. Sehingga kepengurusan penyelenggara pilkada masih tetap menggunakan kepengurusan lama. Di Kelurahan Hegarsari dalam pelaksanaan pilkada walikota 2013 terlihat masih kurang adanya kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada khususnya PPS dan PPK dengan masyarakat sehingga terlihat dengan masih adanya masyarakat tidak paham dan mengerti mekanisme pelaksanaan pilkada.

Penyelenggara pilkada terlihat masih kurang dapat melakukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada

walikota sehingga masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami terkait tata cara pelaksanaan pemilihan Walikota.

4. Mencari Koneksi (*contacting*)

Masyarakat secara individu atau kelompok dalam pelaksanaan pemilihan Walikota 2013 masih kurang dapat membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah sehingga masyarakat secara umum masih kurang memiliki pemahaman terkait pelaksanaan pilkada. Di Kelurahan Hegarsari dalam pelaksanaan pilkada walikota untuk memenangkan salah satu calon terpilih yang diinginkan, masyarakat masih kurang melakukan interaksi dengan masyarakat luas seperti dilakukannya penyampaian informasi terkait visi dan misi serta keunggulan calon tersebut, masih kurang dilakukannya kegiatan berupa perkenalan kepada masyarakat terkait figur calon dan lain-lain.

5. Tindakan Kekerasan (*violence*)

Pada pelaksanaan pemilihan Walikota 2013 di Kelurahan Hegarsari dalam hal hasil akhir perhitungan suara masyarakat tidak melakukan intervensi kepada pemerintah untuk mempengaruhi hasil suara, hasil suara yang dijadikan patokan oleh para pendukung calon menggunakan hasil perhitungan dari para penyelenggara pilkada, namun demikian masyarakat

terkadang melakukan intimidasi dengan cara menjelek-jelekan kandidat yang lain.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa selama ini partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013 bahwa dalam kegiatan pemilihan masyarakat kurang dapat memberikan hak suaranya dalam PILKADA khususnya Pemilihan Walikota, masyarakat telah memiliki pemahaman dan dapat melakukan penilaian atas berbagai keunggulan calon walikota, masyarakat secara langsung melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Ada sebagian yang menjadi tim sukses karena masyarakat tersebut merupakan pengurus partai politik dan keluarga calon walikota.

2. Hambatan – hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap indikator tentang hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013 adalah sebagai berikut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurang adanya calon yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, masyarakat tidak terdaftar sebagai DPT dan bekerja di luar

daerah, masyarakat belum memiliki pemahaman dalam melakukan penilaian atas berbagai keunggulan calon-calon legislative, masyarakat yang sedang sakit keras dan para orang tua dan jompo, kurang terjalinnya hubungan yang baik karena kurang adanya komunikasi dan koordinasi mengenai pelaksanaan pilkada, masyarakat kurang dapat mendapatkan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pilkada walikota, kepengurusan PPS maupun PPK tidak terdapat perubahan atau pergantian anggotanya, kurang adanya kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada khususnya PPS dan PPK dengan masyarakat, belum optimalnya dalam melakukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada walikota.

Berdasarkan hasil observasi bahwa selama ini hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari adalah kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat tidak terdaftar sebagai DPT dan bekerja di luar daerah, kurangnya pemahaman dalam melakukan penilaian atas berbagai keunggulan calon walikota, ketidakpercayaan masyarakat pada tim sukses dan masyarakat lebih cenderung menerima uang dari calon walikota.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan yang timbul dalam

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap indikator tentang upaya mengatasi hambatan dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari adalah sebagai berikut yaitu mendata ulang masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, melakukan pemberitahuan pada masyarakat melalui selebaran atau pamflet tentang DPT, memberikan kemudahan bagi masyarakat terhadap pentingnya ikutserta dalam pelaksanaan pilkada, upaya masyarakat dalam meningkatkan pemahaman penilaian atas berbagai keunggulan calon walikota, upaya agar antara masyarakat dengan para aparatur kelurahan terjalin hubungan baik, upaya agar akses dan informasi yang jelas dapat diterima masyarakat, upaya mendaftar untuk menjadi anggota penyelenggara pilkada dan upaya agar ada perubahan atau pergantian anggotanya, upaya melakukan komunikasi dan pendekatan untuk menciptakan adanya kerjasama antara PPS dan PPK, upaya melakukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada walikota.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai partisipasi

politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013, masyarakat berpartisipasi karena telah memiliki pemahaman dalam melakukan penilaian atas berbagai keunggulan calon walikota, masyarakat mempunyai kedekatan atau merupakan keluarga calon walikota, serta kerap melakukan komunikasi mengenai pelaksanaan pilkada, masyarakat juga sudah terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan hasil observasi bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota masih rendah yang disebabkan belum optimalnya kerjasama antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan kegiatan musyawarah atau rapat secara rutin.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013 yaitu Kurangnya kesadaran, dan keberadaan masyarakat yang sedang berada diluar daerah membuat masyarakat enggan memilih, minimnya

fasilitas untuk masyarakat yang sedang sakit keras dan para orang tua dan jompo; Kepengurusn PPS maupun PPK tidak terdapat perubahan atau pergantian anggota, pejabat pemerintah dan penyelenggara belum memiliki optimalnya hubungan yang terjalin antara pejabat pemerintah dengan penyelenggara pilkada, hal ini terlihat dengan adanya tarik menarik kepentingan demi meloloskan salah satu calon tertentu, masih terjadi situasi yang memanas dikalangan pejabat pemerintah kelurahan dengan penyelenggara pilkada yang diakibatkan adanya kepentingan yang terselip dibalik pelaksanaan tugasnya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2013 yaitu Memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya yang sedang berada di luar daerah dengan cara memberikan informasi jauh sebelum pelaksanaan pilkada, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang sakit atau para orang tua dan jompo dengan cara didatangi ke rumah-rumah bagi yang sakit atau orang tua dan jompo yang sudah tidak bisa kemana-mana.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Panitia penyelenggara sebaiknya melihat masyarakat yang berada di luar kota, masyarakat jompo, supaya lebih memfasilitasi masyarakat yang berada di luar kota dan masyarakat yang jompo, sehingga partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013 dapat ditingkatkan.
2. Sebaiknya pemerintahan Kelurahan Hegarsari memberikan tugas ke masing-masing anggota PPS dan PPK untuk memberikan informasi terkait jumlah DPT dan informasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui selebaran atau famplet yang disebarakan ataupun ditempat pemungutan suara.
3. Sebaiknya PPS dan PPK, pemerintah kelurahan, dan tokoh partai politik dapat bekerja sama, memberikan kemudahan akses dan informasi tentang pentingnya pelaksanaan pilkada melalui kegiatan penyuluhan, pertemuan-pertemuan deangan mengundang masyarakat sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Basrowi, Sukidi, dan Suko Susilo,
2012. *Sosiologi Politik. Bogor.*
Ghalia Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar
Ilmu Politik. Jakarta: PT.*
Gramedia Pustaka Utama.

Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah
Sosiologi Politik. DIKTAT.*

Syafie Kencana, Inu.2002. *Sistem
Politik Indonesia. Jakarta:*
Rineka Cipta

b. Dokumen Perundangan

Undang Undang No. 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum
Kepala Daerah.